

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyiah, Nur. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Palguna, I. D. G. *Welfare State VS Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rahayu, Amy Yayuk Sri, et. al. *Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep* Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ridwan, Juniarso H., et.al. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* Bandung: Penerbit NUANSA, 2009.
- Tui, Fenti Prihatini. *Administrasi Publik & Pelayanan Publik*, Jawa Tengah: Pena Parsada, 2021.

Jurnal

- Abbas, Azhar. "Peran Pengawasan Ombudsman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik" *JURNAL DIALEKTIKA PUBLIK* Vool. 5, No. 1 (2020).
- Absi, Warmiyana Zairi, et.al., "Analisis Yuridis Eksistensi Terhadap Pelayanan Kantor Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah" *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 2 (2024).
- Adiguna, Muhammad "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang Undang Administrasi Pemerintahan" *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- Agusti, Rahmat Wahyu et.al., "Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota" *Sakato Law Journal* Vol. 2, No. 2 (2024).
- Akhyar, "Kualitas Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Mengenai Kepuasan Masyarakat" *Jurnal PenKoMI: Kajian Pendidikan & Ekonomi* Vol. 6, No. 2 (2023).

- Alamsyah, Anggriani “Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service” *Jurnal Politik Profetik* Vol. 4, No. 2 (2016).
- Ardani, Mira Novina, “Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional” *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2, No. 3 (2019).
- Arrazak, Muhammad Afdhal. “Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pengawasan dan Peningkatan Kinerja Pemerintah”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 2, No. 12 (2024).
- Asni, et.al., “Koordinasi Antara Ombudsman Dengan Pihak Penegak Hukum Dalam Penanganan Pengaduan Maladministrasi Di Kota Makassar” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* Vol. 3, No. 6 (2023).
- Asyiah, Nur “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2, No. 1 (2016).
- Atika, Nur et.al., “Strategi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Bangka Belitung”, *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1, No. 9 (2019).
- Banjo, Elstonsius. et.al., “Maladministration and Intentionality on The Criminal Corruption Court in Indonesia” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Banjo Vol. 7, No. 2 (2022).
- Basid, Abdul. “Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara” *Supremasi Hukum* Vol. 9, No. 2 (2020)
- Bazarah, Jamil. et.al., “Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia” *Dedikasi* Vol. 22, No. 2 (2021).
- Benuf, Kornelius. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1 (2020).
- Christiana, Miracle et.al., “Urgensi Perubahan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”,

Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Vol. 7, No. 4 (2024)

Dimiyati, Khudzaifah. et al. "Indonesia As A Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis" *Heliyon* 7, No. 8 (2021).

Dinda Rizki Yanti, et.al., "Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik" *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 3, No. 3 (2026).

Elviandri, et.al., "Quo vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" *Mimbar Hukum* Vol. 31, No. 2 (2019).

Fitriana, Desy Nor. et.al., "Analisis Hukum Keterlambatan Penerbitan Sertipikat Tanah dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah" *Jurnal Kertaya Semaya* Vol. 14, No. 2 (2026).

Fitriyani, Desi. et.al., "Maladministrasi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Sebagai Problematika Hukum Administrasi Negara Dalam Menerapkan Regulasi Percepatan Pembangunan Di Papua" *Jurnal Legislatif* Vol. 4, No. 1 (2020).

Fuad, Achmad Nur. "Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Terhadap Maladministrasi Pungutan Liar Program Nasional Agraria Di Kabupaten Kudus Tahun 2017" *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* Vol. 3, No. 2 (2021)

Gaustiar, Ahmad. et.al., "Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Dilihat Dari Aspek Responsiveness Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong" *Japb* 6, no. 2 (2023): 384, <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/822>.

Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review* Vol. 1, No. 2 (2022).

Hadiyono, V. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya" *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* Vol. 1, No. 1 (2020).

Hariani, Dyah. et.al., "Analisis Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Rangka Penanganan Laporan Masyarakat" *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* Vol. 7, No. 1 (2019).

- Hasan, Rizkiyawan “Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia: Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi Dynamics Of The Concept Of Welfare State In Indonesia: Between The Promise Of The Constitution And Economic Reality” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 10 (2025).
- Hayati, Muslimah “Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah”, *Jurnal Wasakan Hukum* Vol. 9, No. 1 (2021).
- Herman, “Berstuurzorg Pemerintah dalam Negara Hukum Indonesia” *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 1, No. 1 (2019).
- Herman, “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 3, No. 1 (Februari 2017).
- Ilmiyah, Zainatul. “Rekontekstualisasi Konsep Tindakan Pemerintah dalam Memberikan Kepastian Hukum Gugatan Onrechtmatige Overheidsdaad”, *Iblam Law Review* 3, no. 2 (Mei 2023): 202
- Irawan, Endang. “Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik” *Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2021).
- Irwan, Riska et.al., “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai” *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* Vol. 12, No. 2 (2025).
- Iskandar, et.al., “Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Panen di Sektor Perkebunan” *Eko dan Bisnis (Riau Economics and Business Review)* Vol. 16, No. 1, (2025).
- Kamilah, Anita et.al., “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Overlapping” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol. 5, No. 1 (2025).
- Khadijah, et.al., “Pendaftaran Pemindahan Hak atas Tanah oleh kepala Kantor Pertanahan dalam “Keadaan Tertentu” Menurut Hukum Tanah Nasional” *Collegium Studiosum Journal* Vol. 6, No. 1 (2023).
- Kusuma, Dadi Arja. “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2017).

- Latanza, Charity et.al., "New Public Management (NPM) as an Effort in Governance" *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* Vol. 3, No. 2 (2020).
- Lestari, Ipana. et.al. "Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Loa Janan" *Jurnal Administrative Reform* Vol. 12, No. 1 (2024).
- Lestari, Resty. "Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik" *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 8 (2025).
- Libra, Robert et al, "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan di bidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau" *Jurnal ESENSI HUKUM* Vol. 5, No. 1 (2023).
- Luvianti, Teressyavira et.al., "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 PK/PDT/2014)" *UNES Law Review* Vol. 6, No. 2 (2023).
- Mario, Nicola et.al., "Public Organization Between Old Public Administration, New Public Management and Public Governance: the Case of the Tuscany Region", *Public* "67
- Marliani, Lina et.al., "Paradigma Administrasi Publik Dalam Teori dan Praktek" *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 2 (2025).
- Mathovani, Reda et.al, "Pendaftaran Tanah di Indonesia", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* Mathovani Vol. 2, No. 2 (2017).
- Meitasari, Intan et.al., "Urgensi Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 5, No. 1, (2020).
- Mokali, Winda Patrisia et.al., "Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa (Studi Di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)" *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 122 (2022): 40

- Muhajirin, et.al., "Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian" *Journal Genta Mulia* Vol. 15, No. 1 (2024).
- Muklis, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 7, No.1 (2026): 3.
- Mulyadi, et.al., "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda" *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 1 (2019).
- Mulyadina, Arifah. "Modernisasi Pelayanan Publik Pertanahan Berbasis E-Government Sebagai Upaya Penguatan Good Governance dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan" *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 13, No. 12 (2025).
- Nasarudin, Tubagus Muhammad "Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya "Di Indonesia, *Pranata Hukum* Vol. 15, No. 1 (2020).
- Nurkhatimah, et.al., "Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela'ah Fiqh Siyasah)" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* Vol. 2, No. 3 (2021)
- Nuswardani, Nunuk "Rekonseptualisasi Tindakan Pemerintah yang dapat Digugat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Sinkronisasi Dengan Hukum Acaranya", *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* Vol. 2, No. 1 (2024).
- Padol, Muhammad. et.al., "Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", *Mendapo: Journal of Administration Law* Vol. 3, No. 2 (2022).
- Palantung, Rocky Samuel et.al. "Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah melalui Jual Beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997", *Lex Privatum* Vol. 9, No. 6 (2021).
- Penu, Stephanie Angela et.al., "Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Tindakan Faktual Pemerintah", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 6 (2024).

- Praditama, Daffa Adi, et.al., "The Dilemma of Fulfilling Informal Sector Workers' Rights in the Indonesian Welfare State Concept" *Law and Justice* Vol. 8, No. 2 (2023).
- Putra, I Ketut Cahyadi. "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia" *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 6, No. 1 (2017).
- Putri, Ranti Dwi et.al., "Manajemen Komunikasi dalam Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* Vol. 7, No. 2 (2024).
- Putri., N. A. et.al., "Analisis Penerapan Website Kecamatan Gajahmungkur Diukur Dari 3 Elemen Sukses (Support, Capacity, Value) Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 11, No. 2, (2022).
- Qomar, Nurul et.al., "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum", *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* Qomar Vol. 2, No. 2, (2023).
- Radina, Thania Audria et.al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Overlapping Melalui Proses Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang)" *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Vol. 10, No. 2 (2021).
- Rahman, Nazla Arliva et.al., "Beban Administrasi terhadap Lembaga Pengawas Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Jawa Tengah" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10, No. 12 (2024).
- Rauh, Jonathan. "Ethics Problems in the New Public Service: Back to a Service Ethic?" *Public Integrity* Vol. 20, No. 3 (2017).
- Risky, Nurul Alifia et.al., "Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Agraria di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jakarta Raya" *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (Agustus 2023).

- Safitri, Rafikha Nor et.al., “Kualitas Pelayanan pada Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara” *Jurnal Pelayanan Publik* Vol. 2, No. 4 (2025).
- Sahnan, et.al., “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 7, No. 3 (2019).
- Saloranta, Juho. “Establishing a corporate responsibility ombudsman: Enhancing remedy through state-based non-judicial mechanisms?” *Maastricht Journal of European and Comparative Law* Vol. 28, No. 1 (2021).
- Sandy Sulistiono, et.al., “Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda pada PTUN”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Huukum, dan Humaniora* Vol. 2, No. 3 (2024).
- Sari, Jayanti Armida. et al., “Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat ” *PUBLIKAUMA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* Vol. 10, No.2 (2022).
- Sarifuddin, Abdul Jamil, et.al., “Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia” *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023* Vol. 5, No. 1 (2023).
- Septi, Mutiara. et.al., “Peninjauan Hukum Administrasi Negara dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21, No. 3 (2022) .
- Sharon, Grace. et.al., “Tanggung Jawab Ganti Rugi Terhadap Tindakan Maladministrasi yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara” *Binamulia Hukum* Vol. 8, No. 2 (2019).
- Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1, No. 2 (2018).
- Sopian, Ryo Martin “Pertanggung Jawaban Pejabat Pemerintah Akibat Terjadinya Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik”, *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*. Vol. 2, No. 10 (2024).

- Spaltani, Bitu Gadsia. "Rekonsepsi Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling) Guna Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan" *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* Vol. 2, No. 1 (2024).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 147.
- Sulistiyowati, et.al., "Disparity in Authority and Effectiveness of Ombudsman's Recommendation in Preventing Maladministration" *Al-Risalah* Vol. 25, No. 2 (2025)
- Sulubara, Seri Mughni et.al., "Pengawasan Ombudsman Terhadap Kepentingan Publik dalam Kaitannya Terhadap Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila" *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol. 1, No. 4 (2023).
- Supriyadi, "Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan Penu* Vol. 2, No. 2 (2016).
- Suryaningsih, et.al., "Proses Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah" *Jurnal Jendela Hukum* Vol. 8, No. 2 (2021).
- Susanto, Sri Nur Hari "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3, No. 3 (2020).
- Syahputra, Rifaldi Dwi et.al., "Prinsip-prinsip Utama Manajemen George R. Terry", *Manajemen Kreatif Jurnal (MARKEJU)* Vol. 1, No. 3 (2023).
- Tirajoh, Helda Ritta. "Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah" *Lex Et Societatis* Vol. 7, No. 4 (2019).
- Wagiu, Samuel Defa "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah terhadap Sertifikat Ganda yang Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional" *Lex Administratum* Vol. 11, No. 4 (2023).

- Wati, Mustanti Irena et.al. “Konstitusi Dan Kebijakan Publik: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia” *JURNAL RENVOL: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 3, No. 1 (2025).
- Wirananda, Rifqi Diagesta. et.al., “Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Pencegahan Maladministrasi Dan Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang” *Journal of Politic and Government Studies* Vol. 11, No. 2 (2022).
- Yesika, Selvi et.al., “Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado” *Jurnal Governance* Vol. 1, No. 2, (2021).
- Yuniza, Mailinda Eka. et.al., “Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 12, No. 4 (2023).
- Zainuddin, et.al., “Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Pelayanan Publik”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi* 4, no.1 (2025): 392
- Zaki,. Muhammad Ibnu. et.al., “Analisis Penanganan Maladministrasi Di Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat” *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 5 (2025).
- Zees, Sri Wahyuni “Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia” *Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 5, No. 1, (2025).
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, “Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia” *Jurnal Mimbar Justitia* Vol. 2, No. 02 (2016).

Laporan

Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021

Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022

Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023

Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024

Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025

Internet

Ade Setiana, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan”, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Keuangan Negara (April 2022), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlsorong/baca-artikel/14985/Pelaksanaan-Konsolidasi-Tanah-Sebagai-Upaya-Meningkatkan-Efisiensi-dan-Produktivitas-Pemanfaatan-Tanah-Perkotaan.html>.

Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_92_Makalah%20Negara%20Hukum%20Berwatak%20Pancasila_Hakim%20Konstitusi%20Prof.%20Arief%20Hidayat.pdf [diakses pada 22/01/2026].

Dewi, Arum Ratna. “Pentingnya Standar Pelayanan Publik”, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Mei 2021), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan-Publik.html>.

Kiswara, Dida Rizakti. “Pengawasan Ombudsman Melalui Mekanisme Investigasi Atas Prakarsa Sendiri” (Desember 2025), <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pengawasan-ombudsman-melalui-mekanisme-investigasi-atas-prakarsa-sendiri>

Najmi, Syipa Nurul “Mengenal Maladministrasi sebagai Bentuk Penyalahgunaan Tindakan Administrasi dalam Pelayanan Publik”, *International Waqaf Ilmu Nusantara Library* (2023): 3, <https://waqafilmunusantara.com/mengenal-maladministrasi-sebagai-bentuk-penyalahgunaan-tindakan-administrasi-dalam-pelayanan-publik/> [diakses pada 10/02/2026].

Revida, Erika. et.al., “Manajemen Pelayanan Publik”, Yayasan Kita Menulis (Mei 2021): 3, <https://kitamenulis.id/2021/05/03/manajemen-pelayanan-publik/>.

Rochmah, Siti “Analisis Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia”,
Proceeding Call For Paper (2018): 60,
<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/492>

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, <https://books.google.co.id/books?id=NIwmEAAAQBAJ>.

Wawancara

Munisah, Wawancara, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, 29 Januari 2026.

Rio, Wawancara, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, 18 Desember 2025.